

PERMASALAHAN PENDIDIKAN INDONESIA DAN PEMECAHANNYA

Mata Kuliah : Perspektif Global
Kode Mata Kuliah : KPD620316
Program Studi : S1-PGSD
Semester : 6 (Enam) C
Dosen Pengampu : 1. Drs. Muncarno, M.Pd.
2. Siti Nuraini, M.Pd.



Disusun oleh:

Della Delista	2103053115
Lintang Septianingrum	2013053100
Rosyid Bayu Pamungkas	2013053144
Uswatun Isna Lutfiani	2013053074

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PENDIDIK SEKOLAH DASAR
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Permasalahan Pendidikan Indonesia dan Pemecahannya” dengan tepat waktu.

Tentunya dalam penyusunan makalah ini terdapat beberapa pihak yang turut andil, oleh karenanya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Muncarno, M.Pd. dan Ibu Siti Nuraini, M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan.
2. Serta rekan-rekan yang telah berkontribusi dengan memberikan masukan, baik materi dan pikirannya dalam penyelesaian makalah ini.

Semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan serta pengalaman bagi para pembaca. Kami menyadari dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami berharap kritik dan saran dari para pembaca sehingga dapat menyempurnakan makalah ini.

Metro, 7 April 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan	1
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Permasalahan Pokok Pendidikan.....	3
2.2 Faktor Pengaruh Berkembangnya Permasalahan Pendidikan	11
2.3 Solusi untuk Mengatasi Permasalahan Pendidikan	12
BAB III PENUTUP	16
3.1 Kesimpulan.....	16
3.2 Saran	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu cara untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal bagi mencerdaskan peserta didik Indonesia. Peserta didik memperoleh pengetahuan dan pengalaman kognitif, afektif, dan psikomotorik di sekolah tersebut dan pendidik merupakan ujung tombak dalam mencerdaskan peserta didik tersebut.

Namun, pendidikan di Indonesia masih belum efektif dan efisien sebagaimana fungsinya dalam mencerdaskan peserta didik Indonesia. Masih terlalu banyak masalah dan faktor-faktor penyebab berkembangnya masalah yang dialami pendidikan Indonesia tersebut, terlebih pendidikan yang berada di pedalaman Indonesia yang masih jauh dari jangkauan internet, listrik, dan perhatian pemerintah. Selain permasalahan-permasalahan tersebut, masih banyak lagi permasalahan pendidikan yang dialami Indonesia beserta faktor-faktornya. Karena hal tersebut, penyusunan makalah ini dilakukan untuk membahas permasalahan pendidikan Indonesia dan pemecahannya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah:

1. Apa saja jenis permasalahan pokok pendidikan Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan Indonesia?
3. Bagaimana solusi dari permasalahan pendidikan Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja jenis permasalahan pokok pendidikan Indonesia?

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan Indonesia?
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi dari permasalahan pendidikan Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Permasalahan Pokok Pendidikan

Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sangat kompleks, artinya suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat di lepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dari mana peserta didik-peserta didik sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut.

Jenis-jenis Permasalahan Pokok Pendidikan di Indonesia yaitu:

Dalam lingkup nasional, telah ditetapkan empat masalah pokok pendidikan yang dirasa perlu untuk diprioritaskan penanggulangannya.

1. Masalah pemerataan pendidikan

Dalam rangka memajukan bangsa dan kebudayaan nasional serta melaksanakan fungsi dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas demi pembangunan, maka perlu ditekankan bahwa pendidikan di Indonesia harus mampu menerapkan pelaksanaan pendidikan yang merata. Adapun yang dimaksud pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu equality dan equity. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini masalah

pemerataan pendidikan dikatakan timbul apabila masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat mengenyam pendidikan atau dapat dikatakan tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Sejak awal perhatian terhadap pemerataan pendidikan telah mulai digancarkan secara yuridis. Bagi anak-anak usia sekolah, mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan terutama SD merupakan hal yang sangat penting. Diharapkan mereka dapat memperoleh bekal dasar seperti kemampuan membaca, menulis dan berhitung sehingga mampu mengikuti perkembangan bangsa. Permasalahan Pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Sehingga menyebabkan kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

2. Masalah Mutu Pendidikan

Mutu diartikan sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Dalam dunia pendidikan, mutu pendidikan menjadi sorotan karena sangat berperan besar dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang telah tercetak melalui pendidikan. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, pendidik, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Mutu pendidikan menjadi suatu permasalahan apabila hasil dari pendidikan tersebut belum mampu mencapai taraf yang

diharapkan yaitu menghasilkan keluaran berupa tenaga profesional yang berguna bagi bangsanya. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran, dengan system sertifikasi. Selanjutnya jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja. Penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan system tes unjuk kerja.

Jika tujuan dari pendidikan nasional dijadikan sebagai kriteria kelulusan suatu mutu pendidikan, maka keluaran dari suatu system pendidikan menjadikan pribadi yang bertaqwa, mandiri dan berkarya, anggota masyarakat yang sosial dan bertanggung jawab, warga Negara yang cinta pada tanah air dan memiliki rasa kesetiakawanan social. Dengan demikian keluaran tersebut diharapkan mampu mewujudkan diri sebagai manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan juga lingkungan. Terkadang orang-orang melakukan penilaian yang salah terhadap mutu pendidikan. Banyak yang berpendapat bahwa mutu pendidikan dapat dinilai melalui hasil akhir belajar peserta didik, misalkan saja nilai UN (Ujian Nasional). Sesungguhnya mutu pendidikan yang baik hanya akan didapatkan oleh seseorang setelah melalui proses belajar yang baik pula. Memahami dan mengikuti dengan baik proses belajar sehingga diharapkan dapat menunjukkan hasil belajar yang bermutu. Meskipun hasil tes akhir terlihat memuaskan dari segi nilai, namun jika tidak mengikuti proses dengan baik maka hal hasil tidak akan tercipta keluaran yang bermutu secara pribadi masing-masing. Sehingga proses suatu pendidikan sangat menentukan mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan yang harus disoroti dan diusahakan penanggulangannya di Indonesia adalah masalah pemerataan mutu pendidikan terutama antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Pemerataan ini sangat penting adanya agar peningkatan mutu pendidikan dirasakan oleh semua peserta didik di berbagai pelosok tanah air sehingga nantinya memberi dampak positif terhadap munculnya banyak keluaran yang profesional di tanah air ini.

3. Masalah Efisiensi Pendidikan

Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiennya tinggi. Jika terjadi sebaliknya efisiensinya berarti rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah :

- 1) Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan?
- 2) Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan?
- 3) Bagaimana pendidikan diselenggarakan?
- 4) Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga.

Jika penggunaannya tepat sasaran maka dapat dikatakan efisiensinya tinggi. Namun jika terjadi yang sebaliknya maka dikatakan pendidikan memiliki efisiensi rendah. Jika dikaitkan dengan permasalahan nyata di masyarakat, maka masalah efisiensi pendidikan yang perlu memperoleh sorotan yaitu perihal pengangkatan, penempatan dan pengembangan tenaga. Pengangkatan yang dimaksud disini adalah pengangkatan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan lapangan. Namun masalah yang terjadi dalam pengangkatan ini adalah kesenjangan antara tenaga yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pengangkatan dengan kuota pengangkatan yang sangat terbatas. Kebutuhan lapangan tidak mampu menampung semua tenaga kependidikan yang ada sehingga hal ini berarti keberadaan tenaga tersebut tidak dapat segera difungsikan.

Begitu pula dengan masalah penempatan, di Indonesia masalah penempatan pendidik masih saja terjadi dalam lingkungan pendidikan. Seringkali ditemukan bahwa seorang pendidik mengajar suatu bidang studi yang tidak sesuai dengan lulusannya. Hal ini juga dikarenakan oleh masalah jatah pengangkatan yang kurang efisien sehingga ada sekolah dengan jumlah pendidik bidang studi tertentu berlebihan namun kekurangan pendidik untuk suatu bidang studi. Sehingga keberadaan pendidik yang berlebihan akan dialokasikan oleh sekolah untuk mengajarkan bidang studi yang pendidiknya kurang meskipun diluar kewenangan pendidik tersebut. Misalkan saja pendidik IPA harus mengajarkan budi pekerti atau agama.

Hal ini tentu menunjukkan bahwa kurangnya efisiensi dalam pemanfaatan atau memfungsikan tenaga kependidikan.

Jika ditinjau dari masalah pengembangan tenaga kependidikan maka kaitannya adalah penanganan pengembangan tenaga pelaksana di lapangan sangat lambat. Sebagai salah satu contohnya yaitu kesiapan tenaga kependidikan dalam menyambut kurikulum baru. Meskipun ada suatu pembekalan namun para tenaga kependidikan seringkali beranggapan bahwa perubahan kurikulum terlalu cepat dan tidak dibarengi oleh kesiapan dari tenaga pendidik. Kesiapan ini kurang dikarenakan pengembangannya dilapangan juga sangat lambat yaitu berupa penggalakan penyuluhan, latihan, lokakarya serta penyebaran buku panduan baru yang kurang cepat dalam pelaksanaannya. Sehingga masih ada istilah keterlambatan. Keputusan untuk memberlakukan kurikulum ini pun menjadi perbincangan pro dan kontra sehingga memerlukan waktu lama untuk menyepakatinya. Sehingga hal ini dianggap bahwa proses pendidikan kurang efektif dan efisien. Masalah efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana sering juga terjadi dalam dunia pendidikan. Kurangnya perencanaan dalam pengadaan sarana dan prasarana dapat menjadi satu faktor penyebabnya. Sebagai salah satu contoh yaitu adanya pengadaan sarana pembelajaran tanpa dibarengi dengan pembekalan kemampuan dan keterampilan dari pemakai.

4. Masalah Relevansi Pendidikan

Sesuai dengan tujuan dari pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Oleh karena itu sistem pendidikan harus dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Jika hal itu tidak dapat teratasi maka telah mencakup masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuai antara sistem pendidikan dengan keperluan pembangunan nasional. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknis untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Masalah relevansi juga dapat diketahui dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Pendidikan merupakan faktor penunjang bagi pembangunan ketahanan nasional.

Oleh sebab itu, perlu keterpaduan di dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dengan pembangunan nasional tersebut. Sebagai contoh pendidikan di sekolah harus di rencanakan berdasarkan kebutuhan nyata dalam pembangunan nasional kedepannya yang telah terencana, serta memperhatikan ciri-ciri ketenagaan yang di perlukan sesuai dengan keadaan lingkungan di wilayah-wilayah lingkungan tertentu. Lulusan pendidikan dalam hal ini diharapkan dapat mengisi beraneka ragam sektor pembangunan seperti produksi, sektor jasa dan lain-lain baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan mampu memenuhi segala tuntutan pembangunan nasional tersebut maka relevansi pendidikan dianggap tinggi.

Selain permasalahan diatas, terdapat permasalahan lain dalam pendidikan Indonesia yang di sebut permasalahan aktual. Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan yang pada saat ini kita hadapi perlu ditanggulangi secepatnya. Berikut masalah aktual pendidikan yang ada di Indonesia:

1. Masalah ketuntasan pencapaian sasaran

Pada Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional bab II pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian dipertegas lagi didalam GBHN butir 2a dan b tentang arah dan tujuan pendidikan bahwa yang dimaksud dengan manusia utuh adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani, manusia yang memiliki hubungan vertikal (dengan Tuhan), horizontal (dengan lingkungan dan masyarakat), dan konsentris

(dengan diri sendiri); yang berimbang antara duniawi dan ukhrawi. Tetapi di dalam pelaksanaannya pendidikan afektif belum ditangani semestinya. Kecenderungan mengarah kepada pengutamaan pengembangan aspek kognitif. Untuk itu banyak hambatan yang perlu dihadapi untuk mencapai sasaran secara utuh. Adapun hambatan yang harus dihadapi adalah sebagai berikut:

- Beban kurikulum sudah terlalu sarat
- Pendidikan afektif sulit diprogramkan secara eksplisit, karena dianggap menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi yang keterlaksanaannya sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman pendidik.
- Pencapaian hasil pendidikan afektif memakan waktu, sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik.
- Penilai hasil pendidikan afektif tidak mudah.

2. Masalah Kurikulum

Begitu banyak masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami Indonesia. Masalah-masalah ini turut andil dalam dampaknya terhadap pembelajaran dan pendidikan Indonesia. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Sumber masalahnya ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja (bagi yang tidak melanjutkan sekolah) dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk ke perpendidikan tinggi (bagi mereka ingin lanjut). Berikut ini adalah beberapa masalah kurikulum:

- 1) Kurikulum pendidikan Indonesia terlalu kompleks
- 2) Seringnya berganti nama
- 3) Kurangnya sumber prinsip pengembangan.

3. Masalah Peranan Pendidik

Sejalan dengan pengembangan IPTEK yang pesat dan realisasinya dipandu oleh kurikulum yang selalu disempurnakan, maka pendidik sebagai suatu komponen sistem pendidikan juga harus berubah. Dari sisi kebutuhan

peserta didik, pendidik tidak mungkin seorang diri melayaninya. Karena hal tersebut, permasalahan peran pendidik dalam pendidikan Indonesia.

4. Masalah Pendidikan Dasar 9 Tahun

HUU RI Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar, dan Pasal 13 menyatakan tujuan pendidikan dasar. Kemudian PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun, terdiri atas program pendidikan 6 tahun di SD dan program pendidikan 3 tahun di SLTP, Pasal 3 memuat tujuan pendidikan dasar yaitu memberikan bekal kemampuan dasar pada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Ketetapan-ketetapan tersebut merupakan realisasi GBHN 1993 tentang arah pendidikan nasional butir 26 antara lain mengatakan perlunya peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar. Dilihat dari segi lamanya waktu belajar pada pendidikan dasar yaitu 9 tahun, kita sudah mengalami langkah maju dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya yang menetapkan wajib belajar hanya 6 tahun. Secara konseptual dan acuan yang diberikan oleh ketetapan-ketetapan resmi tersebut sudah sejalan dengan kebutuhan pembangunan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, antarlain :

- Realisasi pendidikan dasar yang diatur dengan PP No. 28 Tahun 1989 masih harus dicarikan titik temunya dengan PP No. 65 Tahun 1951 yang mengatur sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar, karena PP tersebut belum dicabut.
- Kurikulum yang belum siap
- Pada masa transisi para pelaksana pendidikan dilapangan perlu disiapkan melalui bimbingan-bimbingan, penyuluhan, penataran, dan lain-lain

2.2 Faktor Pengaruh Berkembangnya Permasalahan Pendidikan

Adapun faktor-faktor penyebab berkembangnya masalah yang dialami pendidikan Indonesia yaitu:

1. Faktor Sosial dan Ekonomi

Faktor sosial dan ekonomi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan sosial dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Faktor ekonomi seperti rendahnya pendapatan, kesenjangan ekonomi, dan kekurangan sarana dan prasarana pendidikan juga dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan.

2. Faktor Kebijakan dan Sistem Pendidikan

Faktor kebijakan dan sistem pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Kurangnya koordinasi dan konsistensi antara kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah dan implementasi kebijakan tersebut di lapangan dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Faktor Pendidik dan Tenaga Pendidik

Faktor pendidik dan tenaga pendidik juga mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidik dan tenaga pendidik yang kurang kompeten dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan efektivitas pembelajaran. Selain itu, kurangnya jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang memadai juga dapat mempengaruhi akses pendidikan.

4. Faktor Teknologi dan Inovasi

Faktor teknologi dan inovasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Kurangnya akses dan penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat menyebabkan ketertinggalan pendidikan Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Selain itu, kurangnya inovasi dan pengembangan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik juga dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran.

5. Faktor Budaya dan Mentalitas Masyarakat

Faktor budaya dan mentalitas masyarakat juga mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Budaya yang cenderung mengutamakan prestasi dan nilai akademik dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, masih terdapat budaya yang menganggap pendidikan hanya untuk golongan tertentu dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan juga dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan.

2.3 Solusi untuk Mengatasi Permasalahan Pendidikan

Permasalahan pendidikan yang dialami Indonesia jika dibiarkan akan mempengaruhi keefektifannya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, berikut solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan Indonesia.

1. Solusi Masalah Pemerataan Pendidikan

Pemecahan masalah pemerataan pendidikan, banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, langkah- langkah ditempuh melalui cara konvensional dan cara inovatif.

2. Solusi Masalah Mutu, Efisiensi dan Relevansi Pendidikan

Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik.

Upaya pemecahan masalah masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen seperti sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut.
- 2) Penyempurnaan kurikulum

- 3) Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tenteram untuk belajar
- 4) Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran
- 5) Kegiatan pengendalian mutu.

Upaya untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan adalah dasar pemikiran makro yang melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah untuk menghadapi tantangan persaingan global. Dengan otonomi dan desentralisasi diharapkan masing-masing daerah termasuk warga masyarakatnya lebih terpacu dalam meningkatkan kualitas SDM dalam memasuki persaingan global tersebut. Kemampuan bersaing tersebut sebagian besar ditentukan oleh pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan dimaksudkan bukan hanya tingkat nasional akan tetapi tingkat internasional, untuk menjamin persaingan di tingkat internasional. Sehingga bangsa Indonesia mampu menjadi “tuan rumah” di negaranya sendiri, sebagai akibat dari tingginya kualitas SDM melalui pendidikan.

3. Solusi manajemen pendidikan

Upaya untuk meningkatkan mutu manajemen sekolah adalah dengan diterapkannya Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). MPMBS ini merupakan alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan. Upaya ini ditandai adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan dalam kerangka kebijakan nasional. Otonomi sekolah diberikan agar sekolah dapat mengelola dengan leluasa, mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, dan sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhannya sendiri. Dengan demikian kebutuhan sekolah dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang di sekolah. Sedangkan masyarakat dituntut berpartisipasi agar mereka lebih memahami pendidikan, membantu serta mengontrol pengelolaan pendidikan.

MPMBS menawarkan kepada sekolah agar dapat menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi para peserta didiknya. Dengan adanya otonomi sekolah menjadikan kinerja para staf, pendidik dan

pimpinan sekolah meningkat, untuk memberikan layanan terbaiknya dalam pembelajaran dan pendidikan. Dengan demikian manajemen sekolah dikelola dengan kebersamaan dan lebih profesional, akhirnya terjadi peningkatan manajemen pendidikan.

4. Solusi masalah peranan pendidik

Untuk memandu proses pembelajaran peserta didik, pendidik dibantu oleh sejumlah petugas lainnya seperti konselor (pendidik BP), pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Seorang pendidik diharapkan mampu mengelola proses pembelajaran (sebagai manajer), menunjukkan tujuan pembelajaran (direktor), mengorganisasikan kegiatan pembelajaran (koordinator), mengkomunikasikan peserta didik dengan berbagai sumber belajar (komunikator), menyediakan dan memberikan kemudahan-kemudahan belajar (fasilitator), dan memberikan dorongan belajar (stimulator).

5. Solusi permasalahan aktual pendidikan

Menurut Tirta rahardja pada (2010:249) beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual pendidikan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Pendekatan keterampilan proses yang sudah disebarluaskan konsepnya perlu ditinjaklanjuti dengan penyebaran buku penduannya kepada sekolah-sekolah. Dalam hubungan ini pelaksanaan pendidikan kesenian perlu diperhatikan khusus sehingga tidak menjadi pelajaran yang dikesampingkan.
- 2) Pelaksanaan kokulikuler dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun pelulusan, untuk itu perlu dikaitkan dengan pemberian intensif bagi pendidik.
- 3) Pemilihan peserta didik atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke pendidikan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat

merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua peserta didik secara potensial mampu belajar di pendidikan tinggi. Oleh karena itu perlu disusun rancangan yang mantap untuk itu

- 4) Pendidikan tenaga kependidikan (pejabat dan dalam jabatan) perlu diberi perhatian khusus, karena tenaga kependidikan khususnya pendidik menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Kegiatan PKG (pusat kegiatan pendidik), MGBS (musyawarah pendidik bidang studi), dan MGMP (musyawarah pendidik mata pelajaran) perlu dikembangkan terus sebagai model pengembangan kemampuan pendidik (*self sustaining competencies*). Pendayagunaan sumber belajar yang beraneka ragam perlu ditingkatkan, upaya ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah, pendidik dan teknisi sumber belajar yang disyaratkan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pendidikan Indonesia pada saat ini masih memiliki permasalahan yang menyebabkan kurang efektifnya dalam menuju tujuan pendidikan. Beberapa permasalahan tersebut yaitu kurang meratanya pendidikan yang ada di Indonesia, mutu pendidikan yang masih rendah, kurangnya efisiensi pendidikan, tidak relevansinya pendidikan, dan masalah aktual. Selain itu, terdapat faktor-faktor penyebab berkembangnya masalah pendidikan tersebut seperti, faktor sosial dan ekonomi, faktor kebijakan dan sistem pendidikan, faktor pendidik dan tenaga pendidik, faktor teknologi dan inovasi, dan faktor budaya dan mentalitas masyarakat. Masalah-masalah tersebut harus diberikan solusi agar pendidikan di Indonesia dapat membangun masyarakat yang utuh.

3.2 Saran

Semua pihak, baik pemerintah, kepala daerah, kepala sekolah, pendidik, maupun masyarakat harus merasa bertanggung jawab terhadap permasalahan pendidikan Indonesia dan ikut andil dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut. Hal tersebut tidak lain untuk memajukan dan menyejahterakan kehidupan kita, untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.A. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djaali, & Firmanzah. (2012). *Pendidikan Indonesia: Meninjau Prospek dan Tantangan di Masa Depan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kurniasih, N. (2019). Pendidikan Inklusif dan Hambatan-hambatan yang dihadapi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(1), 30-38.
- Kurniawan, R. Y. (2016). Identifikasi Permasalahan Pendidikan Di Indonesia Untuk. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun.
- MEGAWANTI, P. (2012). MERETAS PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Formatif*. <https://doi.org/10.30998/formatif.v2i3.105>
- Megawanti, P. (2012). Permasalahan Pendidikan Dasar Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*.
- Rachman, A. (2006). *Pendidikan di Indonesia: Sejarah, Politik, dan Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Sukyadi, H.D. (2013). *Pendidikan Karakter: Visi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.